**ARTIKEL**

**PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

**DI SMA NEGERI 3 MAKASSAR**

***The Implementation of School Based Management (MBS)***

***at SMA Negeri 3 Makassar***

**Muh. Rizah Putrawan**

**15B14007**

****

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

**DI SMA NEGERI 3 MAKASSAR**

**Muh. Rizah Putrawan**

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Gambaran Otonomi Sekolah dalam manajemen berbasis Sekolah (MBS) pada manajemen Sekolah, 2) Gambaran fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam MBS pada manajemen Sekolah , dan 3) Gambaran peran serta masyarakat dalam MBS pada manajemen Sekolah.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan melalui triangulasi dan member check. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Sekolah, wakil kepala Sekolah, guru, pengawas Sekolah, komite Sekolah dan orang tua siswa di SMA Negeri 3 Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi/kemandirian atau kewenangan yang lebih luas dalam mengelola manajemen Sekolah yang terdiri manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen layanan khusus. Sekolah juga memiliki fleksibilitas dalam mengelolah, memanfaatkan dan mengatur sumber daya Sekolah secara transparansi dan akuntabilitas serta pengambilan keputusan secara demokratis dan partisipatif terhadap pengelolaan manajemen Sekolah. Peran serta masyarakat dalam hal ini komite Sekolah terhadap manajemen Sekolah dapat di kategorikan sangat rendah. Peran serta masyarakat pada SMA Negeri 3 Makassar cuma pada permintaan persetujuan kepada ketua komite Sekolah, kalaupun ada peran serta komite Cuma sekedar mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Sekolah agar bisa digunakan berkelanjutan dan pengawasan keamanan dan ketertiban Sekolah.

Kata kunci : kemandirian, fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat

***The Implementation of School Based Management (MBS)***

***at SMA Negeri 3 Makassar***

***Abstract***

The purpose of this study was to find out: 1) Description of School Autonomy in School Based Management (MBS) on School Management, 2) Description of flexibility, transparency, and accountability in MBS on School management; and 3) Description of community participation in MBS on School Management.

This research used descriptive qualitative research approach. Sources of data in this study determined by purposive sampling with data retrieval techniques through observation, interviews and documentation validated through triangulation and member check. Informants in this research were principals, vice principals, teachers, school supervisors, school committees and parents at SMA Negeri 3 Makassar. The results of this study indicate that autonomy / self sufficiency or wider authority in managing school management consisting of curriculum management, management of educators, student management, financial management, facilities and infrastructure management, and special service management. The Schools also have flexibility in managing, utilizing and managing School resources in a transparent andaccountable manner as well as democratic and participatory decision making on School management. Community participation in this case was School committee on School management can be categorized as very low even nothing. The participation of the community in SMA Negeri 3 Makassar was only on request of approval to the head of school committee, even if there was a role of committee just to oversee the use of school facilities and infrastructure that can be used sustainably and to supervise school security and school discipline, as we all know that SMA Negeri 3 Makassar was in the midst of a dense settlement and its surroundings Schools.

*Keywords: independence, flexibility, transparency, accountability and community participation*

1. **Pendahuluan**

Pendidikan di Indonesia masih mengalami sejumlah masalah, terutama yang terkait dengan belum memadainya tata kelola atau manajemen sekolah. Padahal manajemen sekolah yang efektif sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Sementara itu, menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), belum efektifnya manajemen sekolah pada khususnya dam mutu pendidikan pada umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) penerapan pendekatan sistem masih dilakukan secara parsial, (2) rendahnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, dan (3) belum maksimalnya penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS).

 Di Indonesia sendiri, penerapan MBS telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 dan PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan yang paling terakhir adalah Permen Dikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah. Dalam PP No. 66/2010, pasal 49 ditegaskan eksistensi manajemen berbasis sekolah sebagai berikut:

1. Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
3. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
4. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
6. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.
7. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pengertian MBS menurut beberapa ahli dinyatakan sebagai berikut:

1. Menurut Mulyasa (2014:24), MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.
2. Sudjanto (2005:37) MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah.
3. Manajemen berbasis sekolah menurut Fatah (2006:32) merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat.
4. Veithzal rivai dan Sylviana Murni (2009:140) memberikan pengertian MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah.

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa MBS merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari Negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah. Dengan demikian MBS meliputi beberapa karakteristik, yaitu: (1) otonomi sekolah; (2) fleksibilitas, transparansi, ddan akuntabilitas; (3) peran serta masyarakat dalam MBS.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati.Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen aktif sekaligus pengumpul data di lapangan, sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain peneliti adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Dengan adanya kehadiran peneliti secara langsung di lapangan maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang di teliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informasi atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif ada dua sumber informasi (data) yang hendak diidentifikasi. Hal itu meliputi sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Adapun sumber informasi primer terkait penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru-guru.Selain itu terdapat sumber informasi sekunder yang juga memiliki kaitan langsung dengan penelitian yakni: dokumentasi, file, dan lain-lain.Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Kota Makassar.

Fokus penellitian ini adalah pelaksanaan MBS di SMA Negeri 3 Makassar melalui konsep otonomi, fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat terhadap enam aspek pengelolaan sekolah yaitu : kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, layanan khusus.

1. **Hasil Penelitian**

Gambaran otonomi/kewenangan sekolah dalam mengelola manajemen komponen‑komponen sekolah pada SMA Negeri 3 Makassar antara lain, pada manajemen kurikulum dan program pengajaran, disusun kurikulum KTSP SMA Negeri 3 Makassar secara mandiri yang terdiri dari dokumen I dan. II, dan melakukan perencanaan pembelajaran dan memiliki kewenangan dalam memilih strategi, metode dan tehnik pembelajaran dan pengajaran. Manajemen ketenagaan, melakukan analisis kebutuhan guru dan tata usaha, menetapkan deskripsi tugas guru dan tata usaha berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan.

Manajemen kesiswaan, melakukan analisis kebutuhan siswa, melakukan seleksi penerimaan siswa, melakukan pembinaan kedisplinan dan pembimbingan kegiatan keagamaan serta pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen keuangan dan pembiayaan telah melakukan perencanaan, dan menyusun RKAS/RAPBS dalam hal ini Kepala sekolah menyusun sendiri tanpa melibatkan warga sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, kepala sekolah melakukan analisis kebutuhan. Menetapkan prioritas kebutuhan dan mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen layanan khusus, secara otonom dan mandiri memberikan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, pelayanan kesehatan melalui PMR dan layanan bimbingan keagamaan.

Gambaran fleksibilitas, transaransi, dan akuntabilitas SMA Negeri 3 Makassar terlihat sebagai berikut: Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap rencana pembelajaran dan silabus dan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa terkait persiapan mengajar guru, menunjukkan bahwa sebagian besar guru-guru di SMA Negeri 3 Makassar secara mandiri telah melakukan perencanaan program pengajaran yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan, melalui perencanaan program pengajaran yang baik guru akan lebih mudah dalam melaksanakan PBM dan siswa akan terbantu dan mudah dalam kegiatan belajarnya.

Penyusunan persiapan program pengajaran, masing-masing guru menyusun berdasarkan dengan standar kompetensi Kurikulum KTSP kemudian mengambangkannya. Dalam proses belajar mengajar guru berusaha memunculkan kreatifitas siswa dalam belajar, menggunakan media dan alat peraga, mengunakan beberapa macam metode (Ceramah, Tanya jawab, diskusi, demonstrasi, latihan, pemecahan masalah dll) dan sebagian lagi masih monoton dengan metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran apalagi ICT. Dalam hal hasil belajar para guru senantiasa intens memberikan laporan tentang prestasi siswa yang diberikan kepada para orang tua/wali siswa dalam bentuk rapor.

Terkait dengan pengembangan kompetensi, profesionalisme dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sejalan dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan sekolah melakukan beberapa hal yaitu mengutus guru dalam kegiatan MGMP, kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang pengembangan KTSP, kegiatan penyusunan karya tulis ilmiah, diktat dibidang pengembangan strategi pembelajaran dan penggunaan Media pembelajaran, pelatihan penggunaan ICT dan mendorong mutu dan tenaga administrasi dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Selanjutnya memberikan motivasi bagi tenaga pendidik dan kependidikm yang menunjukkan kinerja yang baik dan sebaliknya akan diberi sanksi jika menunjukkan kinerja yang buruk. Kekurangan tenaga pada SMA Negeri 3 Makassar.

Sekolah mengetahui dan mengontrol kegiatan kemajuan belajar siswa dan prestasi belajar siswa apakah melalui buku induk, buku Klapper, buku laporan keadaan siswa, buku prestasi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas dan mutasi siswa perihal penjurusan. siswa, Kenaikan kelas, Kelulusan. dan Mutasi siswa itu telah diatur dan ditetapkan dalam Dokumen I KTSP SMA Negeri 3 Makassar. Sekolah juga menfasilitasi dalam melakukan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Prestasi, minat dan bakat melalui organisasi atau lembaga-lembaga di sekolah. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) ataupun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Selanjutnya pelaporan pertanggungjawaban untuk dana Bantuan Operasional Sekolahpertanggungjawabannya melalui Dinas Pendidikan propinsi sulawesi selatan dilakukan berdasarkan jumlah dana yang telah digunakan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi.

Gambaran peran serta masyarakat dalam MBS, berdasarkan hasil wawancara dengan personel Sekolah dan komite sekolah dalam hal ini, penasehat dan sekertaris komite sekolah dan orang tua siswa,menunjukkan bahwa hampir semua penyusunan program-program sekolah tidak melibatkan komite sekolah, baik Itupenyusunan kurikulum dan program pengajaran, dalam hal pengelolaan ketenagaan peran komite dibilang tidak ada.Dalam pengelolaan kesiswaan peran komite puntidak ada namun apresiasi yang mereka tunjukkan berupa respon positif terhadap kegiatan ekstrakurikuler dengan memberikan izin kepada anak mereka untuk mengikutikegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Karena adanya pendidikan gratis, sehingga peran komite dan masyarakat drastis sangat menurun dalam hal membantu keuangan dan pembiayaan maupun mengevaluasi penggunaan anggaran di sekolah, di samping itu sekolah sudah ada dana dari pemerintah.

Terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan peranan komite bahkan terkesan tidak ada, hal ini implikasi dari adanya peraturanpendidikan gratis tersebut yang diasumsikan oleh hampir semua orang tua siswa dan masyarakat bahwa terkait dengan pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana itu semua menjadi urusan sekolah dan pemeritah.

Sementara Peran serta komite sekolah dan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan misalnya dalam rangka mengatasi kekuranagan akan fasilitas buku-buku pelajaran atau buku teks siswa sampai saat ini belum pernah ada, demikian juga terhadap pelayanan kesehatan, peran serta komite sekolah juga belum pernah ada, sedangkan untuk keamanan lingkungan sekolah, sekolah melalukan pendekatan persuasif melibatkan masyarakat sekitar sekolah untuk turut membantu dan bertanggung jawab atas keamanan sekolah.

1. **Pembahasan**

Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan otonomi sekolah adalah mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sendiri, baik dari segi keuangan, sarana prasarana maupun Kepentingan/kebutuhan pendidikan yang lain. Wujud pemberian kesempatan bagi sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang, masyarakat terutama kepada Tuhan YME(Suparlan, 2014:49).

Implementasi/pelaksanan MBS terhadap komponen-komponen sekolah yang sentralisasikandi sekolah mencakup; Manajemen Kurikulum dan Program pengajaran, Manajemen Ketenagaan, manajemen kesiswaan, Keuangandan Pembiayaan, Sarana dan prasarana Pendidikan, serta Manajemen pelayanan yang Khusus Lembaga Pendidikan.

Salah satu komponen manajemen sekolah adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran dan merupakan bagian dari.Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar (2015:3) Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus di kembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan Kurikulum yang dianut sekolah.

Kegiatan proses belajar mengajar pada SMA Negeri 3 Makassar, telah dilaksanakan secara mandiri oleh para guru dengan mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terintegrasi dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh masing-masing guru. Berdasarkan mata pelajaran yang diampuhnya. Namun demikian penerapan metode‑metode mengajar yang bernuansa PAIKEM belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh para guru hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah.

Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar (2015:3) mendefinisikan manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Mulyasa ( 2012: 42)Manejemen tenaga kependidikan adalah pengelolaan ketenagaan yang dimulai dan mencakup beberapa hal yaitu, perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai.

SMA Negeri 3 Makassar berdasarkan otonomi atau kewenangan yang dimilikinya melakukan pengelolaan tenaga kependidikan (guru dan personil) sudah sejalan dengan yang dikembangkan oleh Mulyasa yang mencakup, perecanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai.

Bidang operasional MBS terkait dengan pengelolaan kesiswaan menurutmulyasa (2012: 46) yaitu: salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.

SMA Negeri 3 Makassar dengan otonomi dan mandiri melakukan pengelolaan kesiswaan sejalan dengan operasional pengelolaan kesiswaan yang dikembangkan oleh Mulyasa dimana pengelolaan- kesiswaan diawali dengan analisis kebutuhan siswa sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu penetapan jumlah siswa yang di terima berdasarkan daya tampung sekolah, penyusunan program-program kegiatan kesiswaan didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah, minat dan bakat siswa, anggaran sekolah yang tersedia, sarana dan prasarana serta tenaga dan kependidikan yang tersedia.

Mulyasa (2012: 48), mengemukakan bahwa: Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: (1) pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, (2) orang tua/wali atau peserta didik, dan (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid dan masyarakat ditegaskandalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional atau UU No. 2 tahun1989 yaitu kemampuan pemerintah terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua/wali murid.

SMA Negeri 3 Makassar dengan otonomi dan mandiri untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah melakukan pengelolaan keuangan sejalan dengan operasional pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh Mulyasa yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan di sekolah.

Mulyasa (2012: 49) mengemukakan bahwa: kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.SMA Negeri 3 Makassar secara otonomi dan mandiri melakukan pengelolaan sarana dan
prasaran pendidikan yang sejalan dengan operasional pengelolaan sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh Mulyasa yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Mulyasa (2012: 52) mengemukakan bahwa: manajemen khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan sekolah sebagai satuan pendidikan yang berfungsi dan bertanggung jawab, melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.SMA Negeri 3 Makassar secara otonomi melakukan pengelolaan layanan khusus pendidikan yang sesuai dengan pendapat Mulyasa yang meliputi pelayanan bimbingan dan konseling, layanan belajar mandiri melalui perpustakaan, layanan kesehatan dan bimbingan rohani serta memberikan kenyamanan, keamanan lingkungan sekolah.

Karateristik MBS juga dapat dlihat dari fleksibilitas, transparansi,dan akuntabilitas sekolah yang dapat di lihat dalam berbagai bodang manajemen. Konsep fleksibilitas terhadap pengelolaan kurikulum bermakna sekolah memiliki kebebasan dalam mengembangkan, memperdalam, memperkaya dan memodifikasi tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, kebutuhan dan potensi dimana sekolah berada. Menurut Arismunandar (2006: 55), manajemen kurikulum dan pembelajaran pada sekolah dikatakan berjalan dengan baik jika indikatomya terpenuhi, yaitu mengembangkan -kompetensi dasar, mengembangkan kurikulum muatan lokal, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi hasil belajar untuk kemajuan belajar siswa, melaksanakan evaluasi hasil belajar, merumuskan dan melaksanakan program pengayaan dan remedial bagi siswa, dan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang efektif.

SMA Negeri 3 Makassar fleksibilitasnya ditunjukkan terhadap pengelolaan kurikulum dan program pengajaran dimana sekolah mengembangkan, memperdalam, memperkaya dan memodifikasi kurikulum dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tetap memperhatikan kondisi, kebutuhan dan potensi lokal. Fleksibilitas sekolah meskipun pada pelaksanaannya belum pada tataran maksimal, namun indikator pengelolaan kurikulum dan program pengajaran yang fleksibiliti dengan pendapat Arismunandar (2006:56), meliputi pengembangan kompetensi dasar,mengembangkan kurikulum muatan lokal, merancang dan melaksanakan pembelajaran mengembangkan alat evaluasi hasil belajar untuk kemajuan belajar siswa, melaksanakan evaluasi hasil belajar, merumuskandan melaksanakan program pengayaan dan remedial bagi siswa, dan mengembangkan metode pembelajaran efektif.

SMA Negeri 3 Makassar Menunjukkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pada SMA Negeri 3 Makassar belum pada tataran maksimal balk pada pemberdayaan tenaga maupun pada pembinaan dan pemberian penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh guru dan tata usaha.

SMA Negeri 3 Makassar laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan peserta didik yang menunjukkan akuntabilitas manajamen komponen sekolah yang terkait dengan manajemen kesiswaan dapat diketahui mulai dari proses penerimaan siswa baru, pengumuman hasil seleksi PPDB, sampai pada pelaporan tentang keadaan dan prestasi siswa melalui buku induk siswa, buku Mutasisiswa dan rapor siswa yang merupakan laporan atas prestasi siswa setiap satu semester yang disampaikan kepada orang tua/wali siswa. Dengan demikian pengelolaan kesiswaan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip MBS yang fleksibel, transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan komponen sekolah khususnya pada manajemen kesiswaan.

Sumber penerimaan dana Pendidikan pada SMA Negeri 3 Makassarbersumberdari pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sementara bantuan dari masyarakat dan bantuan lainnya itu tidak ada, padahal menurut Arismunandar (2006: 19) sekolah yang baik adalah jika persentase pembiayaan oleh masyarakat dan usaha lainnya lebih besar dari persentase penerimaan bantuan pemerintah.

Data hasil penelitian pada SMA Negeri 3 Makassar menunjukkan bahwa pengunaan dana peruntukkannya berdasarkan kebutuhan atau skala prioritas dan dimanfaatkan dengan prinsif efektifitas dan efesiensi.Pelaporan penggunaan dan pihak sekolah rutin melakukan [pertanggung](http://pertanggu.ng) jawaban penggunaan dana kepada pemerintah melalui Dinas PendidikanPropinsi Sulawesi Selatan. Sementara transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*sekolah tidak terlaksana, selain karena tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran sekolah juga informasi jumlahanggaran sekolah dan penggunaan dana tidak dicantumkan pada papan informasi.

Berdasarkan paparan data-data tersebut di atas, terungkap bahwa pada SMA negeri 3 Makassar, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip MBS yaitu transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan komponen sekolah terkait dengan menejemen keuangan.

Karakteristik MBS yang terakhir adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, terhadap penyelenggaraan sekolah telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut Komite Sekolah. Secara resmi keberadaan Komite Sekolah ditunjukkan melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003) menyatakan "Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen sekolah". Dengan demikian Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

Berdasarkan data-data di atas terungkap bahwa partisipasi Komite Sekolah pada SMA Negeri 3 Makassar pada pengelolaan komponen-komponen sekolah sangat rendah, baik dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatanprogram sekolah dalam evaluasi pelaksanaan program-program sekolah.

1. **Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakansebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran otonomi pada SMA Negeri 3 Makassar merniliki kemandirian yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan personil sekolah baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf dan murid serta masyarakat melalui manajemen kurikulum dan pengajaran sekolah, manajemen peserta didik, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen layanan khusus secara mandiri berdasarkan kebutuhan warga sekolah dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan yang berlaku.
2. Gambaran fleksibilitas pengelolaan komponen sekolah sudah optimal dalampemberdayaansumber daya sekolah dengan maksimal, pengelolaan program dan keuangan belum pada tataran prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Gambaran Partisipasi Komite Sekolah sangat rendah bahkan tidak ada pada pelaksanaan manajemen komponen sekolah baik dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan program sekolah maupun dalam evaluasi pelaksanaan program-program sekolah, partisipasi komite sekolah .

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut

1. Hendaknya otonomi/kewenangan yang diberikan kepada sekolah dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin dalam pengelolaan komponen sekolah.
2. Demi transparansi kegiatan program kerja dan sumber, pemanfaatan dan penggunaan dana, agar terbuka dan melibatkan*stakeholders*dalam penyusunandan menyediakan papan data dan informasi untuk dapat dilihat Dan diketahui.
3. Sekolah sebaiknya lebih giat melakukan pendekatan dan sosialisasi program kerja kepada masyarakat agar orang tua siswa dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan lebih memahami pentingnya mendukung program kegiatan sekolah biarpun bukan dalam bentuk dana. sehingga program kerja sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat terlaksana.
4. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan pengetahuan tentang fungsi sebagai manajer dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya sehingga dapat terjalin hubungan yang serasi dan selaras dengan semua warga sekolah termasuk masyarakat serta merubah pola pikir dan pola pandang, bahwa kemajuan sekolah tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang terbangun/tersedia tetapi jugabagaimana meningkatkan dan memanfaatkan SDM di sekolah.
5. Kepada dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan supaya diklat MBS tidak hanya diproritaskan kepada Kepala sekolah tetapi juga bagi guru-guru serta meninjau kembali Peraturan Pendidikan gratis, karena dengan peraturan pemerintah tersebut masyarakat berasumsi bahwa keseluruhan biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

**Daftar Isi**

Depdiknas. 2001 MPMBS, *Konsep & pelaksanaan*, Jakarta : Dirjen Dikdasmen

Fatah, Nanang,s 2003. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung Pustaka Bani Quraisy

Hamiyah, Nur. Dan Jauhar, Muhammad. 2006. *Manajemen berbasis Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010, MPMBS, *Konsep & pelaksanaan*, Jakarta : Dirjen Dikdasmen

Mulyana.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya.*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. 2014.*Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)*Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

--------------, 2006. Manajemen Berbasis Sekolah (konsep, strategi, implementasi) cetakan ke – 10, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

--------------. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi.*Cetakan ke-11 Bandung: Rosdakarya.

----------------, 2011.*Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)* cetakan ketigabelas, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sudjanto Bedjo, 2005. Manajemen Pendidikan Bebasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah, Jakarta : CV. Sagung Seto.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989.*Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta Sinar Grafika

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta Sinar Grafika